

**POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DALAM  
MENINGKATKAN FUNGSI DPRD KOTA MEDAN  
(Studi Telaah Rekrutmen Calon Legislatif Partai Amanat  
Nasional Kota Medan )**

**SKRIPSI**

**KUAT SURBAKTI  
NIM: 098510065**



**ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

## LEMBARAN PENGESAHAN SKIRIPSI

**NAMA : KUAT SURBAKTI**  
**NIM: NIM : 098510065**  
**PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN**  
**JUDUL :POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF  
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI DPRD KOTA  
MEDAN (Studi Analisis Rekrutmen Calon Legislatif  
Partai Amanat Nasional Kota Medan )**



**Menyetujui**

**KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs. H. IRWAN NASUTION, S.Pd, MAP**

**Drs. MHD, ASWIN, Hsb, MAP**



**DEKAN**

**Drs. H. IRWAN NASUTION, S.Pd, MAP**

## ABSTRAK

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir sebagai wujud tanggungjawab sebagaimana anak bangsa yang berusaha meletakkan semangat dan jiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Amanat Nasional hadir sebagai panggilan ditengah gelombang reformasi Bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan.

PAN dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara punya peranan penting dalam meningkatkan kualitas berbangsa lewat peran-peran politiknya lewat rekrutmen yang akan didudukkan dalam legislative,

Untuk itu dalam merancang peningkatan kualitas dan peran dalam pelaksanaan tugas tugas DPRD diperlukan kehidupan partai politik dengan menjalankan fungsi fungsinya agar peran partai politik juga bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk mendapatkan anggota legislative kota Medan yang berasal dari PAN penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pola rekrutmen calon legislatif dalam meningkatkan fungsi dprd kotas medan (studi analisis rekrutmen calon legislatif partai amanat nasional kota medan )

Dan sebagai lokasi penelitian dilaksanakan di kota Medan mengambil sampel penelitian anggota DPRD dari PAN dan Anggota PAN Kota Medan dengan melakukan tehnik penelitian wawancara, obeservasi dan bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan dalam upaya meningkatkan peran dari lembaga DPRD Kota Medan

Pada penelitian ini ditemukan salah satu pertimbangan yang paling mendasar adalah asas dan platform suatu partai PAN yang berfungsi sebagai pedoman, kaidah yang menuntun jalan bagi partai tersebut dalam mengelola perjalanan organisasinya agar bisa berlangsung secara efektif dan efisien.

Begitu juga anggota PAN yang akan menjadi calon Anggota DPRD yang disiapkan menduduki anggota legislative ini adalah dengan mengedepankan calon-calon yang memiliki Akhlak Politik, Terbuka, Mandiri, memiliki Moralitas Agama dan pribadian (kebangsaan), Amanah (ketuhanan dan kemanusiaan), Mandiri (kerakyatan dan keadilan) dan mengikuti kaderalisasi seperti Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) Nilai-Nilai Dasar Partai Amanat Nasional tentu sesuai tingkatannya secara formal..

Kata Kunci: Pola rekrutmen

## DAFTAR ISI

	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	7
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kerangka Pemikiran .....	
G. Hipotesis.....	10
	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penertian Partai Politik dan Fungsi Politik.....	12
1. Sosialisasi Politik.....	14
2. Rekrutmen Politik.....	14
3. Komunikasi Politik.....	16
4. Artikulasi Politik.....	17
C. Pengertian, tugas DPRD dan Fungsi DPRD.....	18
1. Tugas dan wewenang DPRD.....	
	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	19
A. Populasi Sampel .....	19
a. Populasi.....	19
b. Sampel.....	20



B. Sumber Teknik Pengumpulan Data.....	20
C. Variable dan Defenisi Operational .....	21
D. Metode Analisis Data.....	22
<b>BAB IV .GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Kota Medan .....	23
B. Kota Medan secara Administrativ.....	23
C. Kondidi Georafis.....	26
1. Letak.....	26
2. Iklim.....	27
D. Kota Medan Secara Demokratis .....	28
1. Keadaan Penduduk.....	29
2. Keadaan Pekerjaan. ....	29
3. Jumlah Partai Politik.....	30
4. Propil PAN Kota Medan.....	34
<b>BAB V POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DALAM</b>	<b>36</b>
<b>MENINGKATKAN FUNGSI DPRD KOTA MEDAN .....</b>	<b>36</b>
A. Partai Amanat Nasional (PAN) .....	36
B. Nama Dan Kedudukan .....	36
C. Pola Rekrutmen Calon Legislatif.....	37
D. Pola Penyiapan Calon Legislatif .....	39
a. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) .....	39
b. Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) .....	40
c. Latihan Kader Amanat Utama (LKAU) .....	41
E. Nilai-Nilai Dasar Partai Amanat Nasional .....	41
1. Azas Partai.....	41
2. Akhlak Politik.....	42
3. Agama.....	42

4. Rahmat Bagi Seluruh Alam.....	43
<b>F. Sifat Partai.....</b>	<b>44</b>
1. Terbuka.....	44
2. Mandiri.....	45
<b>G. Identitas Partai.....</b>	<b>46</b>
1. Moralitas Agama.....	47
2. Kemanusiaan.....	48
3. Kemajemukan.....	48
4. Tes st Kesehatan dan Test psikologi.....	48
<b>H. Nilai-Nilai dasar Partai Amanat Nasional. ....</b>	<b>50</b>
1. Patriotik.....	50
2. Amanah.....	52
3. Mandiri.....	54
<b>I. Fungsi Dasar dan Azas Partai.....</b>	<b>56</b>
1. Penyelenggaraan Organisasi.....	56
2. Kaderisasi.....	57
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan judul skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagaimana syarat guna memenuhi pendidikan jenjang pada Program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Skripsi ini, merupakan hasil penelitian pada partai politik yaitu Partai Amanat Nasional Kota Medan yang berisi tentang latar belakang dijadikannya ini sebagai bahan penelitian yang menjadi bahan dasar pemikiran, rumusan masalah, batasan masalah, populasi dan sampel hingga rencana waktu dan tempat penelitian berikut metode penelitian serta hasil penelitian dan beberapa kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada, kedua orangtua saya, istri dan anak-anak saya serta sahabat sahabat saya baik di Partai Politik maupun rekan rekan di Anggota DPRD Kota Medan sehingga skripsi ini bisa disusun, mudah mudahan penelitian ini dapat menjadi tulisan ilmiah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana S1 dan bisa bermanfaat yang nantinya untuk penelitian-penelitian lainnya.

Untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini, maka pada kesempatan ini saya

mengucapkan terima kasih kepada; Bapak Dekan Drs. H.Irwan Nasution,S.Pd, MAP sekaligus sebagai Pembimbing I, Pembimbing II Bapak Drs. Mhd. Aswin, Hsb, MAP, Panitia Sidang meja Hijau dan Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, Serta kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan sejawat

Demikian saya sampaikan atas segala bantuan semua pihak saya ucapkan Terima Kasih



Wassalam  
Penulis

Kuat Surbakti



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir sebagai wujud tanggungjawab sebaqian anak bangsa yang berusaha meletakkan semangat dan jiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat konstitusi itu terkristalisasi dalam pernyataan politik bangsa yang kemudian menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagaimana sejarah kita, bangsa Indonesia mengalami proses sejarah perpolitikan yang penuh dinamika .Sejak Proklamasi kemerdekaan RI dibawah Presiden Soekarno, politik nasional mengalami pasang surut system politik kita mulai demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga system federal.

Berbagai masalah politik kemudian muncul seiring dengan proses tarik-menarik kepentingan sehingga melahirkan polarisasi kekuatan politik ditengah-tengah rakyat hingga menimbulkan beberapa aksi pementangan yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Peristiwa Politik yang sangat monumental dan menjadi titik kritis sejarah yang ditandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno sekaligus membawa sejarah bangsa ini kedalam fase medewasakan bangsa dan memamatkan kehidupan berdemiokrasi.

Peristiwa yang membawa priodesasi pemerintahan Soeharto bangsa Indonesia memasuki periode politik yang otoriter. Rezim otoriter dibawah Soeharto dan kroninya dinilai telah memasung demokrasi bangsa dan membawa bangsa Indonesia pada keterpurukan. Selama pemerintahan Soeharto lebih kurang 32 tahun dibawah rezim yang otoriter telah membawa bangsa Indonesia krisis secara ekonomi, social budaya, dan harga diri bangsa Indonesia dimata dunia internasional yang diakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tahun 1998 yang kemudian menumbangkan kekuasaan otoriter Orde Baru, bagi seluruh rakyat Indosensia dan partai-partai termasuk Partai Amanat Nasional merupakan titik pijak untuk menentukan dan menegakkan sikap guna meletakkan semangat Proklamasi dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai Amanat Nasional hadir sebagai panggilan ditengah gelombang reformasi Bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan. Saat itu PAN bertindak sebagai pelopor reformasi dalam memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kehadiran PAN hingga saat ini, sejatinya harus menjadi “katalisator yang baik” bagi tumbuhnya sikap-sikap positif untuk melakukan perubahan menuju perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PAN sebagai partai politik berusaha menegakkan idealism Proklamasi dengan cara membangun nilai-nilai positif dijunjung tinggi, dipraktikkan, dan dijadikan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif oleh para anggotanya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang positif itu dibangun di atas nilai-nilai kebaikan yang telah diakui secara universal. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diharapkan berlangsung

secara permanen dan pada akhirnya terakumulasi menjadi budaya masyarakat baru yang positif sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri PAN dan menjadi pola dalam menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa, baik di eksekutif, yudikatif lebih-loebih legislative.

Untuk itulah maka, sangat urgens kiranya menentukan dan menetapkan nilai-nilai dasar yang positif dan universal tersebut sebagai dasar perilaku setiap kader PAN dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menyadari bahwa tata kehidupan yang dibangun di atas nilai-nilai dasar yang positif dan universal diyakini bias melahirkan tata kehidupan yang buruk, negative, dan tidak produktif adalah produk dari nilai-nilai negatife yang tidak memiliki akar falsafah kehidupan yang bernilai dan bermartabat.

Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berkumpul berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam system demokrasi kita. Dengan demikian partai politik harus ditata dan harus berkualitas tentunya partai yang bertumpu pada kaedah-kaedah kedaulatan rakyat dengan memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.

Kebebasan yang bertanggung jawab segenap warga Negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap

warga Negara berfikir dalam rangka kersedrajan sekalipun fungsi dan kedudukan dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi maka partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan

Dalam system politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan menuju kehidupan politik memeberikan peran kepada partai politik, sebagai asset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan peningkatan kualitas partai politik tersebut diimplementasikan agar dapat direfleksikan rasa kebersamaan dalam mewujudkan cita cita berbangsa

Keterkaitan antara kehidupan berpartai yang sehat dalam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) oleh karenanya fungsi DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota yang lebih ditingkatkan.

Untuk itu dalam merancang peningkatan kualitas dan peran dalam pelaksanaan tugas tugas DPRD diperlukan kehidupan partai politik dengan menjalankan fungsi fungsinya agar peran partai politik juga bisa dilaksanakan secara optimal

Sehingga peran DPRD sebagai mitra pemerintah sangat tergantung bagaimana Partai Politik mampu melahirkan calon anggota legislatif yang akan duduk dalam lembaga DPRD tentunya agar tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik.

Oleh karena itu dalam meningkatkan peran DPRD harus melalui rektutmen calon legislative yang duduk sebagaimana disinggung diatas juga

menjadikan DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mampu menjadikan masyarakat lebih percaya dan yakin akan lembaga yang mengaspirasikan keinginan keinginan dari masyarakat

Maka dalam mencapai hal tersebut rekrutmen calon legislative dalam upaya meningkatkan tugas DPRD harus dilakukan secara optimal sehingga dalam melaksanakan perannya dalam kehidupan berbangsa mampu mengakomodir aspirasi masyarakat.

Untuk merespon hal-hal demi terciptanya peningkatan fungsi anggota DPRD dituntut peran Partai Politik maka dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan bagian dari DPRD yang telah berhasil mendudukan anggotanya dilegislatif diharuskan dapat menyiapkan para calon anggotanya untuk dapat berperan dalam menjalankan tugas lembaga DPRD untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan dalam upaya meningkatkan peran dari lembaga DPRD Kota Medan

Untuk menemukan pola itu salah satu pertimbangan yang paling mendasar adalah asas dan platform suatu partai PAN yang berfungsi sebagai pedoman, kaidah yang menuntun jalan bagi partai tersebut dalam mengelola perjalanan organisasinya agar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. PAN sebagai partai politik merupakan suatu gerakan yang terstruktur menuju pencapaian cita-cita bermasyarakat,

PAN sebagai partai politik bertujuan mewujudkan Indonesia baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu PAN harus dikelola secara modren dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang dimasyarakat nasional maupun international.

Sebagai asas dalam organisasi partai merupakan perangkat (software). Yang menjalankan program partai (platform)., program partai ini harus dikelola oleh orang-orang yang handal untuk itu diperlukan menemukan anggota PAN yang akan menjadi calon Anggota DPRD sebagai rekrutmen dalam menyiapkan para anggota dalam menduduki anggota leguslatif.

Maka kedua hal diatas akan saling berinteraksi secara sinergis dan mutualistik dalam usaha menempatkan anggotanya sebagai anggota legislative

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menggali pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam meningkatkan fungsi DPRD dengan menganalisis pola rekrutmen dalam Partai Amanat Nasional dengan mengambil judul “POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DALAM MENINGKATKAN FUNGSI DPRD KOTA MEDAN” (Studi Telaah Rekrutmen Calon Legislatif Partai Amanat Nasional Kota Medan )

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan Pola Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kota Medan dapat meningkatkan fungsi DPRD Kota Medan

## **B. Pembatasan Masalah**

Menurut Suhardi (2003:1), suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui, atau belum diketahui sepenuhnya kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan. Agar tidak menimbulkan kekaburan dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu dibuat suatu pembatasan masalah.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi bagaimana pola rekrutmen calon legislative yang berasal dari Partai Amanat Nasional Kota Medan

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui Pola Rekrutmen Calon Legislatif dari PAN
- Untuk mengetahui apakah Pola Rekrutmen yang dilakukan calon legislative dari Partai Amanat Nasional dapat meningkatkan Fungsi DPRD Kota Medan
- Untuk memberikan pemikiran kepada PAN sendiri dan Partai-Partai lain dalam melakukan rekrutmen anggotanya untuk menjadi calon legislative di Kota Medan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada lima manfaat yang dapat diuraikan dari penelitian ini, antara lain:

- Hasil penelitian dapat menemukan pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai Amanat Nasional dalam merekrut anggotanya dalam legislative Kota Medan
- Untuk mengetahui peran Partai Amanat Nasional dalam melakukan rekrutmen anggotanya menjadi anggota DPRD Kota Medan
- Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses rekrutmen politik bagi partai-partai lain dan para pemerhati partai politik

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah bagaimana pola rekrutmen calon legislatif dalam meningkatkan fungsi legislative di Kota Medan, dengan mengambil studi tentang anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari PAN Kota Medan dengan alur pemikiran, adanya selektivitas rekrutmen yang terstruktur dari PAN Medan mulai dari keanggotaan mulai masuk yang diharuskan mengikuti pendidikan dasar dikepartaian sesuai tingkatannya hingga harapan menghasilkan anggota DPRD yang berkualitas.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah Jika pola rekrutmen calon legislatif PAN dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi PAN maka legislatif kota Medan akan semakin baik



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Kerangka Teoretis**

##### **1 Pengertian Partai Politik dan Fungsi Politik**

Partai politik adalah organisasi politik yang mempunyai ideologi tertentu atau dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai pandangan yang sama dan visi yang sama dalam mencapai tujuannya, atau dalam definisi lain partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, Mariam Budiarjo (2005, 39) Carl J. Friedrich menyebutkan :

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi

pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Sementara R.H. Soltou lebih lanjut mengemukakan (Mariam Budiardjo 2005:98)

Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Defenisi lainnya Sigmund Neumann (Mariam Budiardjo 2005: 130) menyebutkan

Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Selanjutnya Miriam Budiardjo menyebutkan : Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

## 2. Fungsi Partai Politik

Dalam menjalankan fungsinya Partai Politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah Partai Politik berfungsi sebagai

a. Sosialisai Politik

Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi parpol sebagai sarana sarana sosialisasi politik.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contoh: misal seperti pada contoh komuikasi politik tadi, dilingkungan Karang Taruna misalnya akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya

sudah habis. Nah proses Karang Taruna tersebut dalam mencari ketua dan anggota Karang Taruna baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penunjukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama halnya dengan Parpol, parpol akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

Pola perekrutan calon anggota legislative, sebab kualitas anggota legislative dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam lembaga dewan perwakilan rakyat sangat ditentukan oleh kualitas partai politik dan bagaimana keanggotaan partai politik mampu mempersiapkan kadernya untuk duduk di lembaga dewan perwakilan rakyat.

Untuk itu penelitian ini adalah bagaimana organisasi Partai Amanat Nasional (PAN) kota Medan dalam melakukan perekrutan dan menyiapkan calon anggota legislative yang akan menduduki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mensurvei bagaimanakah pola perekrutan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional kota Medan lewat sistem yang baku dalam melahirkan calon anggota legislative yang berkualitas di Kota Medan

Mengingat Kota Medan merupakan kota besar dan salah satu kota metropolitan dengan berbagai problema masyarakat menumpukan harapannya kepada DPRD Kota Medan yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagai lembaga aspirasi yang menyalurkan keinginan masyarakatnya, maka dalam hal inilah diperlukan juga kualitas para calon-calon yang akan duduk didalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari segi keadaannya Kota Medan mempunyai yang cukup luas dengan jumlah penduduk sekitar 2,258.000 jiwa dan jumlah kecamatan sebanyak 21 .

#### c. Fungsi Komunikasi

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Contoh: misal dilingkungan Karang Taruna, ini juga sama halnya ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misalnya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara anggota Karang Taruna membahas mengenai kurangnya fasilitas kepemudaan. Selanjutnya Karang Taruna menyampaikan aspirasi/tuntutan anggotanya tadi kepada pihak yang berkenan seperti partai Politik ataupun lembaga DPRD. Interaksi antara anggota (masyarakat), Karang Taruna (parpol) dan pihak DPRD/ Pemerintah, merupakan suatu komunikasi.

#### d. Fungsi Artikulasi

Dalam proses pengembangan tujuan-tujuan kolektif, partai-partai juga membantu mengartikulasikan dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat. Memang, partai sering berkembang sebagai kendaraan melalui mana kelompok-kelompok bisnis, buruh, agama, etnik, atau kelompok lainnya, memperluas atau mempertahankan beragam kepentingannya.

Contohnya, Partai Buruh di Inggris, diciptakan oleh gerakan serikat dagang untuk tujuan mendapatkan representasi politik kelas pekerja. Partai lain secara efektif memiliki kemampuan untuk merekrut kepentingan dan kelompok tertentu untuk memperluas basis pemilihnya, sebagaimana yang dilakukan partai-partai di Amerika Serikat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 kepada kelompok-kelompok imigran.

Fakta bahwa partai-partai nasional sedemikian mengartikulasikan tuntutan dari beragam kekuatan memaksa partai-partai itu untuk mengagregasikan kepentingan ini dengan membawanya ke dalam kesatuan kepentingan yang koheren dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Partai-partai konstitusional secara jelas dipaksa untuk melakukan hal ini di bawah tekanan kompetisi pemilihan umum, tetapi bahkan partai-partai monopolistik pun mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan melalui hubungan dekatnya dengan negara dan ekonomi, khususnya di dalam sistem ekonomi yang terencana secara terpusat.

Tetapi, bahkan di dalam sistem partai kompetitif pun tidak semua kepentingan diartikulasikan dan apalagi diagregasikan. Kelompok-kelompok kecil, yang relatif miskin dan secara politik tak terorganisir menjadi sangat rentan untuk dikucilkan dari proses artikulasi kepentingan.

## B. Pengertian, Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPRD memiliki fungsi :

- a. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- b. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- c. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah

1. Tugas dan wewenang DPRD adalah:

Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Untuk DPRD provinsi, mengusulkan pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.

Untuk DPRD kabupaten, mengusulkan pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

Untuk DPRD kota, mengusulkan pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.. Dan memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

- a. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- d. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. DPRD juga memiliki hak-hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.
- g. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Menurut Sugiono (2006: 55) Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian. Selain itu Sugiono juga mendefinisikan, populasi adalah wilayah yang terdiri atas; objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Para Pengurus Partai Amanat Nasional Kota Medan dan Anggota DPRD yang berasal dari partai Amnat Nasional Kota Medan

##### **b. Sampel**

Arikunto (2006: 109) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili jumlah populasi dalam penelitian



Untuk menentukan jumlah besaran sampel dalam penelitian Arikunto (2006: 112) memberi pendapat untuk sekedar batasan, apabila subjek dalam penelitian kurang dari 100 dikategorikan sampel kecil yang dalam penelitian jumlah populasi tersebut otomatis juga menjadi sampel secara langsung, namun jika subjeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10-15%, sebab jumlah tersebut dapat dianggap mewakili jumlah populasi yang ada atau tergantung setidak-tidaknya dari:

- a). Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana,
- b). Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data,
- c). Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti

Pada penelitian ini, yang menjadi sampel adalah

- a. Pengurus Partai Amanat Nasional Kota Medan ,  
Pengurus Anak Cabang PAN Kota Medan
- b. Anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari Partai Amanat Nasional

## **B. Sumber dan Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan dalam mendukung kesahihan dan analisis data dengan tehnik yang bersumber dari berbagai key person berupaya yaitu :

- a. Data primer: Pimpinan dan pengurus Partai Amanat Nasional Kota Medan

- b. **Data sekunder: Literature-literatur yang relevan dengan penelitian, berupa Undang-Undang dan peraturan tentang kepartai dan lembaga dan keanggotaan DPRD Kota Medan.**

Disamping sumber-sumber tersebut penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan tehnik pengumpulan data berupa

- a. **Observasi secara intensif untuk mengetahui kondisi objektif tentang Rekrutmen Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional Kota Medan**
- b. **Melakukan Wawancara yakni Tanya jawab terstruktur dengan para Informan atau pihak yang terkait dengan masalah penelitian dalam rangka menggali data yang diteliti secara akurat.**
- c. **Melakukan pencatatan semua data penelitian yang berkaitan dengan Pola Rekrutmen calon legislatif dalam meningkatkan fungsi DPRD Kota Medan**

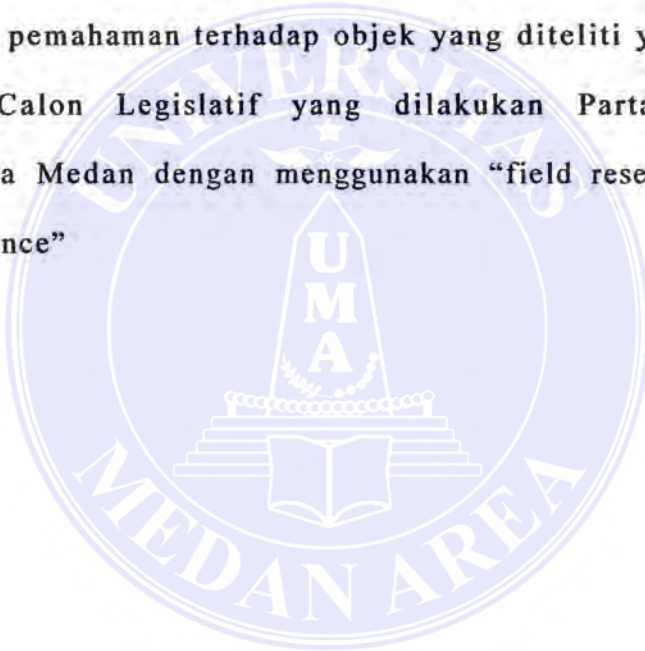
### C. Variable Penelitian

Penelitian ini mempunyai variable bebas dan variable terikat dan yang menjadi vareiable terikat berupa pola rekrumen dan dan yang menjadi variable bebas yaitu meningkatkan fungsi DPRD kota Medan

#### **D. Tehnik Analisis data**

Dalam poropsal ni nantinya akan memakai teknik analisis data , dengan menggunakan Analisis data dan mendeskripsikannya dengan menganalisis dan membandingkan pola rekrukmen yang sudah ada ataupun yang telah diberlakukan pada partai partai lain, dengan menggunakan analisis data sebagaimana diatas dan melakukan wawancara pada informan informan secara mendalam dan tersruktur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif juga beratkan pada pemahaman terhadap objek yang diteliti yaitu Pola Rekrutmen Calon Legislatif yang dilakukan Partai Manat nasional Kota Medan dengan menggunakan "field research" dan farm of reference"



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan adalah pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba, yang terkenal sebagai tempat wisata, serta objek wisata Pantai Cermin, yang terkenal dengan pemandangan lautnya dilengkapi dengan waterboom Theme Park.

Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar (265,10 Km<sup>2</sup>) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, tetapi dengan jumlah penduduk yang relatif besar.

#### B. Kota Medan secara Administrative

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan Menjadi 144 Kelurahan.

Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administrative ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

Secara administratif, wilayah kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini

menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Begitu juga dalam pemerintahan Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Sumatera Utara dan pusat penyelenggaraan administrative basic Kota Medan sebagai ibukota medan itu sendiri baik sebagai Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini



### C. Kota Medan Secara Geografis

Secara geografis kota Medan terletak pada  $3^{\circ} 30' - 3^{\circ} 43'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$  Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Wilayah kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.

Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, (1) faktor geografis, (2) faktor demografis dan (3) faktor sosial ekonomi. Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi).

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang

terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan

#### **D. Kota Medan Secara Demografis**

Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adapt istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola fikir masyarakat dan perubahan social ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian.

Dalam kependudukan dikenal istilah transisi penduduk. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain perubahan pola fikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya, dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Penurunan tingkat kematian disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan penduduk

mulai

menurun.

Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi atau urbanisasi. Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan berbagai berbagai dinamika social yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik (commuters), mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan.

Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi atau urbanisasi. Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan berbagai berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun cultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik (commuters), mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Kota Medan saat ini diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui

merupakan penduduk tetap , sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk commuters. Dengan demikian Kota Medan Merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga memiliki deferensiasi pasar.

Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju(komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, Kota Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian Kota Medan secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

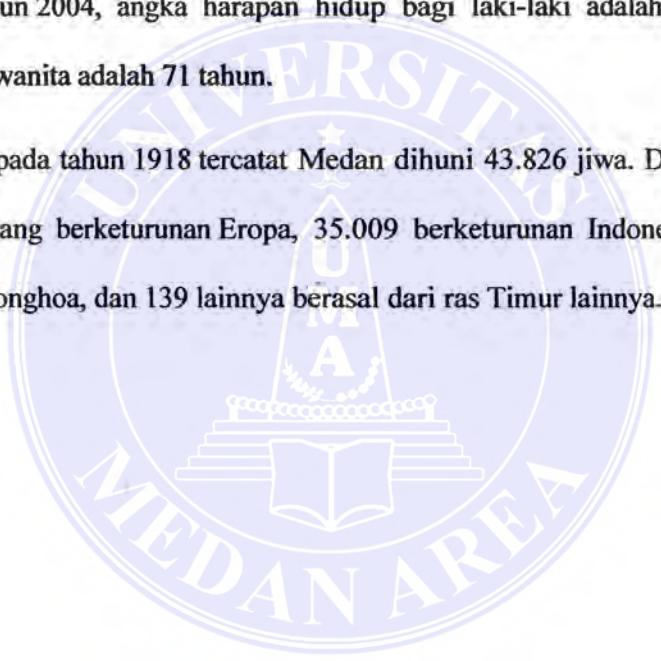
Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. sedangkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per Km<sup>2</sup> pada tahun 2004. jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul kecamatan Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit , terdapat di kecamatan Medan Baru, Medan Maimun dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area dan Medan Timur.

Mayoritas penduduk kota Medan sekarang adalah suku Jawa dan Batak, tetapi di kota ini banyak tinggal pula orang keturunan India dan Tionghoa. Komunitas Tionghoa di Medan cukup besar, sekitar 25% jumlah total.

Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jalan Zainul Arifin bahkan dikenal sebagai Kampung Madras (Kampung India).

Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi laki-laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita adalah 71 tahun.

Secara historis, pada tahun 1918 tercatat Medan dihuni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang berketurunan Eropa, 35.009 berketurunan Indonesia, 8.269 berketurunan Tionghoa, dan 139 lainnya berasal dari ras Timur lainnya.



## Tabel Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Di Kota Medan

Tahun 2005 – 2009

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Kepadatan.Penduduk (Jiwa/KM <sup>2</sup> )
[1]	[2]	[3]	[4]
2005	2.036.185	265,10	7.681
2006	2.067.288	265,10	7.798
2007	2.083.156	265,10	7.858
2008	2.102.105	265,10	7.929,5
2009	2.121.053	265,10	8.001

Sumber.BPS.Kota.Medan

Melalui data tabel diatas diketahui, jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### E. Propil Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan

#### 1. Nama Dan Kedudukan

Partai Amanat Nasional, disingkat PAN yang dibentuk dan dideklarasikan pada hari Ahad/Minggu tanggal dua puluh tiga Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (23-8-1998) di Jakarta.

Dalam struktur kepengurusannya PAN memiliki Struktur Dewan Pimpinan Pusat , Dewan Pimpinan Daerah I dan II hingga Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan daerah Kota Medan (DPD) adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat kabupaten dan kota untuk masa jabatan lima tahun

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) memiliki fungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat kabupaten dan kota terkait konsolidasi, koordinasi dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun dan merumuskan , dan memperjuangkan aspirasi rakyat ;

DPD kabupaten /Kota memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, dan musyawarah cabang, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, dan rapat kerja daerah, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi.

Melakukan konsolidasi organisasi secara structural mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga DPRt , Pimpinan Rayon dan Sub Rayon.

Mengesahkan susunan pengurus DPC sesuai hasil keputusan Musyawarah ;

Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang dan musyawarah ranting, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, rapat kerja caang dan rapat kerja ranting, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi.

Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat DPD melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai.



Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua DPC ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut.

Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat kecamatan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, dan musyawarah cabang, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, dan rapat kerja cabang, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPUALN DAN SARAN**

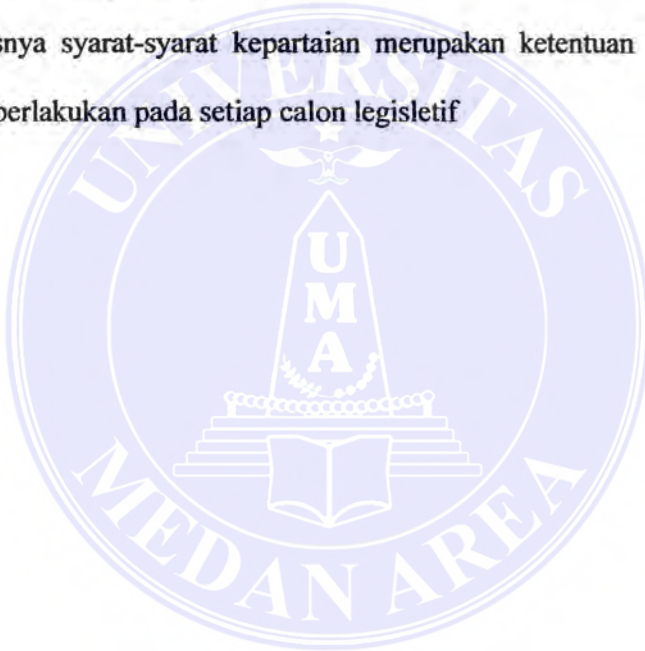
Partai Amanat Nasional berhikmat kepada kebaikan individu, kebaikan masyarakat serta kebaikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, seluruh pembahasan di atas merupakan dasar, asas, sifat, identitas, dan landasan gerak partai ini agar kehadiran bagi usaha mencapai cita-cita dan tujuan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah suatu keniscayaan bahwa pembahasan dan konstruksi pemikiran dijelaskan secara panjang lebar tersebut hendaknya bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, maka sebagai kesimpulan dalam melahirkan Calon Legislatif yang berasal dari Partai Amanat Nasional ditaris Kesimpulan.

##### **1. Kesimpulan.**

- a. Partai Amanat Nasional Kota Medan dalam melahirkan calon Legislatif Memiliki semangat yang kuat dalam menempatkan anggota legislatifnya sesuai dengan ketentuan organisasi
- b. Partai Amanat Nasional mempunyai ciri khas tersendiri dalam menanamkan semangat reformasi dalam melahirkan calon legislatifnya, hal ini disemangati faktor bahwa PAN merupakan inisiator reformasi
- c. Partai Amanat Nasional memiliki sumber daya manusia dalam mengislah calon legislatif Kota Medan, namun setiap kader tetap melewati persyaratan untuk duduk dalam legislatif

2. Saran –saran.

- a. Dalam menempatkan calon legislative PAN seharusnya mengedepankan aturan partai dalam mendudukan calon legislatifnya.
- b. Partai Amanat Nasional seharusnya mempertahankan semangat reformasi dalam meletakkan perjuangan partainya lewat anggota legislative dalam partainya.
- c. Seharusnya syarat-syarat kepartaian merupakan ketentuan yang harus diberlakukan pada setiap calon legisletif



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Partai Manat Nasional, DPP PAN, Jakarta 2011
- Bukhori, Muhammad. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Gramedia  
2005
- Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Rajawali Pers, Jakarta, 1982
- Drs. Sukarna, Kekuasaan Kediktatoran Dan Demokrasi , Alumni,, Jakarta 1981
- Gibson, dkk. Manajemen. Jakarta: Erlangga 1990
- Hadari, Nawawi. Kepemimpinan Yang Efektif. Yogyakarta: UGM Press, 1992
- Juwono Sudarsono, Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik, Yayasan Obor  
Jakarta, 1976
- Kartono Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofyan. Metode Penelitian Survei. Jakarta:  
LP3ES, 1989
- Pedoman Pengkaderan Partai Amanat Nasional, DPP PAN, Jakarta 2011
- Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia  
Pustaka, 1995
- Prof. Miriam Budiardjo, Perkembangan Ilmu Politik Di Indonesia, Ghalia,  
Jakarta 1983
- , Dasar Dasar Ilmu Politik, Gramedia Jakarta, 2005
- SP. Varma. Teori Politik Modren ,PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999
- Sugiyono. Statistik untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung, 2006
- Suryabarata, Ermaya. Kamus Ilmiah Populer. Bina Aksara, Jakarta, 1997

**Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah**

----- **Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu**

----- **Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota**

**Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan**

**Perwakilan Rakyat Daerah**

----- **Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**

----- **Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**

